

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam bentuk rencana tiga tahunan dengan penjabaran perencanaan pertahun untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Rencana Strategis ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kinerja SKPD dalam mendukung kinerja pemerintah daerah melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029, sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang akan diurai dalam bab ini.

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan berbagai pemangku kepentingan dan menjawab tuntutan perkembangan situasi saat ini baik tingkat regional maupun nasional serta secara global.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan indikator kinerja sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai sarana pencapaian.

II.2 Visi dan Misi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tekad melanjutkan pembangunan Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui RPJMD tahun 2025 – 2029 berVISI mewujudkan **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”**, dengan 7 (tujuh) MISI antara lain :

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
- 2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Mempeluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- 7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dukungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada pencapaian VISI MISI RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, terutama pada upaya pencapaian MISI Kedua dalam rangka “Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat “.

II.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi untuk mendukung misi kelima Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan adalah : **Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatnya Ekspor Barang.
2. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan melalui program-program disektor perdagangan. Secara keseluruhan perumusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Tujuan – Sasaran – Indikator – Target Kinerja
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20
		1. Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52

		2	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64
--	--	---	--	---	------	------	------	------	------

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2025-2045, selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan selanjutnya menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029.

Rencana Kinerja Tahun 2025

Penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja (performance plan) tersebut dalam bentuk target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan pada proses pengukuran keberhasilan setiap periode pelaksanaan. Rencana kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,92
		1. Meningkatkan Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	%	21,26
		2. Meningkatkan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,13

II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,92
2	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	%	21,26
3	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,13

Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	80,12	12.144.024.617
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	100%	162.272.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.642.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.630.000
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	100%	10.174.287.000
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 orang	9.494.674.000
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	440.813.000
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	238.800.000
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	100%	13.080.000
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.080.000
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	100%	718.790.200
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108.335.000

	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	55.000.0000
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3650 Exemplar	15.000.000
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	515.455.200
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	100%	462.164.660
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	393.164.660
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	57.000.000
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%	613.430.757
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	180 Unit/Tahun (R4=11 unit, R2= 4 unit)	330.128.000
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	83.302.757
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	200.000.000
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Tingkat Kemudahan Perizinan Usaha Perdagangan	100%	34.248.400
	I	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	100%	34.248.400
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	34.248.400
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI	90%	2.422.130.400

	I	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	90%	2.422.130.400
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	452 Unit	2.112.000.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	209.056.000
		Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	50 orang	101.074.400
IV		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Pedagang	418.806.800
	I	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,13%	380.552.000
	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	12 laporan	93.152.000
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	287.400.000
	II	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90%	38.254.800
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	38.254.800

V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Tingkat Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Eksportir	2,5 - 5%	554.156.243
	I	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekspor baru setiap tahun	5%	554.56.243
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	339.996.243
	27	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	214.160.000
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Pengaduan Penanganan Konsumen	90%	711.886.414
	I	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	90%	339.838.714
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	339.838.714
	II	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100%	232.245.200
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	100.891.200
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Laporan	131.354.000
	III	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	70%	139.802.500
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	12 Laporan	139.802.500
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Peningkatan Jenis Produk Ekspor	100%	122.500.000

	I	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	5 UMKM	122.500.000
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	5 UMKM	122.500.000
Jumlah					16.407.752.874